

ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nasruddin¹, Nia Kurniati², Syaumudinsyah³, Iswan⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

ndin5760@gmail.com

Abstrak

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah digunakan analisis rasio. Penelitian ini bertujuan 1) untuk menganalisis penilaian kinerja keuangan daerah terkait kemampuan keuangan daerah, kemampuan keuangan daerah, dan ketergantungan daerah terhadap pusat, 2) untuk menganalisis rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja, 3) untuk menganalisis efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, data yang digunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemda NTB periode 2020- 2023, selanjutnya data tersebut akan dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemampuan dan kemandirian keuangan mengalami peningkatan, dan pada rasio ketergantungan mengalami penurunan, yang artinya Pemda mampu untuk melaksanakan wewenang desentralisasi. Pada rasio pertumbuhan pendapatan tahun 2020 dan 2022 bernilai negatif, artinya tidak mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan pada tahun 2021 dan 2023 bernilai positif, artinya mengalami peningkatan, tetapi untuk rata-rata rasio efektivitas pendapatan berada pada kategori cukup baik. Pada rasio pertumbuhan belanja rasionya > 40% kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena belanja Pemerintah setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kata kunci: Anggaran, Penilaian, Kinerja Keuangan, Laporan Keuangan, Rasio

ABSTRACT

Government financial statements are an important component of creating public sector accountability. The purpose of financial statements is to provide information used to evaluate managerial and organizational performance. To evaluate government financial performance, ratio analysis is used. This study aims 1) to analyze the assessment of regional financial performance related to regional financial capability, regional financial capability, and regional dependence on the center, 2) to analyze the ratio of revenue and expenditure growth, 3) to analyze the effectiveness of revenue and expenditure efficiency. This research method is a qualitative method, the data used is secondary data in the form of the NTB Regional Government Budget Realization Report for the period 2020-2023, then the data will be analyzed using financial ratio analysis. The results showed that the ratio of financial capability and independence has increased, and the dependency ratio has decreased, which means that the local government is able to carry out the authority of decentralization. The revenue growth ratio in 2020 and 2022 is negative, meaning that there is no increase in revenue, while in 2021 and 2023 it is positive, meaning that it has increased, but the average revenue effectiveness ratio is in the good enough category. In the ratio of expenditure growth ratio > 40% inefficient category. This is because government spending increases every year along with the increase in development and community services.

Keywords: Budget, Assessment, Financial Performance, Financial Statements, Ratio

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat, dengan tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya pemerintah hadir sebagai penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan tujuan bernegara. Pemerintah merupakan organisasi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan berbagai aktivitas guna mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan kepentingan negara (Putra *et al.*, 2022). Pemerintah pusat merupakan sumber kekuatan atas bergeraknya seluruh kegiatan di suatu negara. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan prinsip pemerataan dan keadilan, pada tahun 1999 otonomi daerah diberlakukan di Indonesia dan aturan tersebut direvisi kembali pada tahun 2004.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan (Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004a) bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004b). Pada dasarnya, otonomi daerah atau desentralisasi adalah perwujudan dari demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai perwujudan demokratisasi dimaksudkan adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan

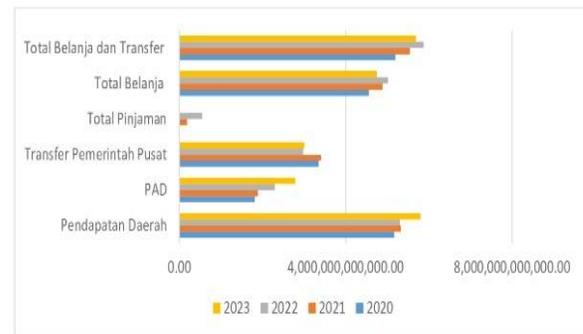
dan aspirasi masyarakatnya. Sedangkan otonomi daerah sebagai pemberdayaan diartikan sebagai proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengurus, mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya sendiri, sehingga secara bertahap daerah mampu untuk mandiri dan melepas ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Ambya, 2023).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang dalam menentukan arah pembangunan daerah lebih mandiri. Hal ini dilakukan, agar daerah mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Sistem pemerintahan suatu daerah dapat berjalan dengan efektif apabila didukung oleh berbagai faktor sumber daya yang terdapat pada daerah tersebut yang mampu memberikan nilai tambah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor keuangan daerah menjadi faktor utama untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan suatu daerah, apabila daerah memiliki keuangan yang memadai, maka urusan pemerintahan dalam melaksanakan fungsinya dapat berjalan dengan baik. Apabila daerah memiliki keuangan yang kurang/tidak memadai, maka akan berpengaruh juga terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, daerah harus mampu memaksimalkan sumber pendapatan daerah agar mampu meningkatkan penerimaan daerah setiap tahunnya.

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui pelaksanaan desentralisasi, fungsi pemerintah

tertentu dilimpahkan kepada pemeritahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kebijakan otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintahan semakin dekat dengan masyarakatnya agar pelayanan yang diberikan semakin baik. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan kepada pengguna/pemakai laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional (Mardiasmo, 2009). Laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan.

Provinsi NTB memiliki potensi yang begitu besar untuk bisa membuat wilayahnya terus berkembang. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah tentunya anggaran sangat diperlukan untuk membiayai segala program/kegiatan pemda untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah melakukan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepatuhan dan keadilan (Irnawati, 2017). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode tertentu. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemda NTB tahun 2020 sampai dengan 2023 kondisi keuangan selalu mengalami defisit anggaran pada tahun 2020 sampai tahun 2022, yang artinya nilai belanja lebih besar dibandingkan dengan nilai pendapatan daerah, sementara tahun 2023 pemda NTB mengalami surplus anggaran.



Grafik 1. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB, Tahun 2020 – 2023

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019 (Pemerintah Provinsi NTB, 2022) (Pemerintah Provinsi NTB, 2023) (Pemerintah Provinsi NTB, 2024)

Berdasarkan grafik 1 terlihat bahwa total pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun 2020 – 2021, pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan, hal ini terlihat dalam Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2022 pemerintah mengalami penurunan dari pendapatan transfer yaitu Dana Alokasi Umum yang turun 0,03% dan dana penyesuaian mengalami penurunan sebesar 74%, sedangkan dari PAD mengalami peningkatan. Selanjutnya total pendapatan daerah pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Sedangkan pada realisasi belanja terjadi peningkatan pada tahun 2022, hal ini dikarenakan karena penambahan jumlah anggaran pada belanja pegawai.

Salah satu keberhasilan kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah meningkatnya kemandirian dan secara bertahap mengurangi ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat. Untuk mencapai tingkat kemandirian fiskal ini, pemda harus berusaha maksimal untuk terus meningkatkan PAD. Sejalan dengan hasil penelitian Dewi, dkk menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian (Anjani, Eka Sintala Dewi, Akram, Handajani, 2015). Selain itu dalam penelitian Ruddy tri, dkk dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PAD dan pendapat daerah akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, tingkat kemampuan dan kemandiri juga akan meningkat (Santoso, Syukri and Hasanah, 2021).

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja keuangan pemda, maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Kinerja diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Patarai, 2018). Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja dengan menggunakan indikator keuangan. Penggunaan laporan keuangan sebagai alat analisis dapat membantu pihak pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang rasional dan sesuai dengan tujuan entitas. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan yaitu analisis yang membandingkan angka-angka yang terdapat di dalam laporan keuangan, dimana angka-angka yang dibandingkan dapat dari satu periode ataupun beberapa periode. Analisis rasio dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan entitas, selain itu digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja atau hasil yang dicapai selama periode yang dianalisis. Hasil analisis rasio ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dari keberhasilan pemda dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Hasil analisis rasio ini juga akan menjadi salah dasar dari penilaian keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai dengan hasil penelitian Nurabiah yang menyatakan bahwa kinerja keuangan antara pemerintah daerah yang memiliki opini WTP menunjukkan rasio yang berbeda sehingga tingkat kinerjanya berbeda (Nurabiah, 2018). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penilaian kinerja keuangan daerah terkait kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan ketergantungan daerah terhadap pusat.
2. Untuk menganalisis rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja
3. Untuk menganalisis efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumentasi dan studi

kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi NTB selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dan data pendukung mengenai statistika yang didapatkan melalui BPS NTB. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data - data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari lapangan, selanjutnya data tersebut akan dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan. Adapun analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Rasio kemampuan keuangan daerah atau derajat desentralisasi fiskal (DDF)

Rasio kemampuan keuangan daerah (DDF) digunakan untuk menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio ini juga untuk melihat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai PAD,

$$DDF = \frac{\text{total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Nilai Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (Derajat Desentralisasi Fiskal)

Nilai rasio DDF (%)	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup baik
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

maka akan semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasinya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

Sumber : (Halim, 2007)

2. Rasio pengukuran tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat

Rasio pengukuran tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat digunakan untuk menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pusat. Semakin besar nilai rasionya maka semakin besar pula tingkat ketergantungan daerah terhadap dana eksternal yang berasal dari pemerintah pusat. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio ketergantungan} = \frac{\text{total pendapatan transfer}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Nilai Rasio ketergantungan daerah terhadap pusat

Nilai rasio ketergantungan (%)	Kriteria
0,00 – 10,00	sangat rendah
10,01 – 20,00	rendah
20,01 – 30,00	sedang
30,01 – 40,00	cukup tinggi
40,01 – 50,00	tinggi
> 50,00	sangat tinggi

Sumber : (Halim, 2007)

3. Rasio kemandirian keuangan daerah

Analisis rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk melihat kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total PAD dengan total pendapatan transfer dan pinjaman pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya maka akan semakin tinggi pula tingkat kemandirian pemda untuk melaksanakan desentralisasi dan semakin berkurang ketergantungan kepada pemerintah pusat. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{\text{total realisasi PAD}}{\text{total transfer pemerintah pusat} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Nilai Rasio kemandirian keuangan daerah

Nilai rasio kemandirian (%)	Kriteria	Pola Hubungan
0,00 – 25,00	sangat rendah	instruktif
20,00 – 50,00	rendah	konsultatif
50,00 - 75,00	sedang	partisipatif
75,00 – 100,00	cukup tinggi	delegatif

Sumber : (Halim, 2007)

4. Rasio pertumbuhan pendapatan

Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

5. Rasio pertumbuhan belanja

Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik, dikarenakan beberapa alasan diantaranya penyesuaian

terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan cakupan layanan.

6. Rasio efektivitas pendapatan

Rasio efektivitas pendapatan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan kemampuan pendapatan, selain pendapatan hibah dengan target yang sudah ditetapkan berdasarkan potensi riil. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan daerah.

Tabel 4. Kriteria Nilai Rasio Efektivitas Pendapatan

Nilai rasio efektivitas pendapatan (%)	Kriteria
> 100	sangat efektif
100	efektif
90,00 – 99,00	cukup efektif
75,00 – 89,00	kurang efektif
< 75	tidak efektif

Sumber : (Mahmudi, 2010)

7. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi Belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Jika tingkat efisiensi rendah, berarti belanja negara semakin kecil, sehingga kinerja pemerintah bisa dikatakan semakin baik.

Tabel 5. Kriteria Nilai Rasio Efisiensi Belanja

Nilai rasio efisiensi belanja (%)	Kriteria
< 10	sangat efisien
10 - 20	efisien
21 - 30	cukup efisien
31 - 40	kurang efisien
> 40	tidak efisien

Sumber : (Mahmudi, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi NTB memiliki luas wilayah 19.675,89 km² dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, diantaranya tanah pertanian dan potensi pertambangan yang turut serta mendorong perekonomiann di NTB. Selain itu,

keindahan alam menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung, salah satu diantaranya yaitu dengan adanya Kawasan Ekonomi Kreatif di Mandalika dan adanya Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Pengembangan berbagai potensi di NTB memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, kebijakan tepat, keterlibatan masyarakat lokal dan pemerintah. Provinsi NTB memiliki 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang terbagi menjadi 2 pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, selain itu juga banyak terdapat pulau-pulau kecil yang dinamakan Gili. Berikut luas wilayah provinsi NTB dirinci menurut Kabupaten/Kota :

Tabel 6. Luas Wilayah Provinsi NTB Dirinci Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Persentase (%)
Lombok Barat	923,06	4,69
Lombok Tengah	1.169,52	5,94
Lombok Timur	1.606,47	8,16
Sumbawa	6.655,92	33,83
Dompu	2.281,75	11,60
Bima	4.216,09	21,43
Sumbawa Barat	1.743,58	8,86
Lombok Utara	811,19	4,12
Kota Mataram	60,42	0,31
Kota Bima	207,89	1,06
NTB	19.675,89	100

Sumber : Statistik Daerah Provinsi Nusa NTB 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2024)

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa Kabupaten Sumbawa merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah yang paling luas mencapai 6.655,92 km² atau 33,83% dari luas provinsi NTB, sedangkan Kota Mataram merupakan Kota Mataram memiliki luas yang paling sempit yakni 209,89 km² atau 1,06% dari luas provinsi NTB. Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah NTB memiliki potensi unggulan yang berbeda, sehingga pemda NTB diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerah agar mampu meningkatkan pembangunan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mengevaluasi kinerja pemerintahan, salah satunya dengan menganalisis kinerja keuangan pemda, sebagai bentuk laporan

pertanggungjawaban.

1. Analisis Pengukuran Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (Derajat Desentralisasi Fiskal), Pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat

a. Analisis Pengukuran Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (Derajat Desentralisasi Fiskal)

Analisis pengukuran rasio kemampuan keuangan daerah digunakan untuk menunjukkan kemampuan dari suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya, hal ini terkait dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Rasio ini dapat dianalisis dengan membandingkan total nilai PAD dengan total pendapatan daerah periode tertentu. Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan nilai rasio kemampuan keuangan daerah (Derajat Desentralisasi Fiskal) adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023

	Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (%)	Kriteria
2020	35,09	cukup baik
2021	35,45	cukup baik
2022	43,23	baik
2023	48,12	baik

Sumber : data sekunder, diolah peneliti

Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa rasio kemampuan keuangan daerah NTB mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 40,47% kriteria baik. pada tahun 2020 dan 2021 memang terlihat rasio kemampuan keuangan daerah berada pada kriteria cukup baik. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 di Indonesia bahkan di mancanegara sedang mewabahnya virus Covid-19 yang melumpuhkan berbagai sektor perekonomian. Sehingga banyak anggaran yang dialokasikan

(belanja) kepada pencegahan penyebaran virus Covid-19, sementara untuk pendapatan daerah mengalami penurunan. Akan tetapi, pada tahun 2022 dan 2023 kondisi perekonomian sudah mulai pulih dan pemerintah pusat melalui Keppres No.17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Virus Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Indonesia, menyatakan bahwa menetapkan status pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) telah berakhir dan mengubah status faktual *Corona Virus Disease* (Covid-19) menjadi penyakit endemic di Indonesia (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023).

b. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk melihat kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total PAD dengan total pendapatan transfer dan pinjaman pada periode tertentu. Berdasarkan perhitungan, maka didapatkan nilai rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2023

Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kriteria	Pola Hubungan
2020	54,18	Sedang	Partisipatif
2021	52,43	Sedang	Partisipatif
2022	64,97	Sedang	Partisipatif
2023	92,76	Tinggi	Delegatif

Sumber : data sekunder, diolah peneliti

Berdasarkan tabel 8 terlihat bahwa, selama tahun 2020 – 2022 tingkat kemandirian pemda NTB berada pada kriteria sedang dengan pola hubungan kepada pemerintah pusat adalah partisipatif yang artinya pengarahannya dari pemerintah pusat semakin berkurang karena tingkat kemandirian daerah semakin meningkat, sehingga dikatakan sebagai daerah yang mendekati mampu untuk menyelenggarakan urusan otonomi daerahnya. Sementara itu pada tahun 2023, dengan nilai rasio kemandirian mencapai 92,76% kriteria tinggi dan pola hubungan delegatif, artinya pemda dianggap

sudah mandiri dan mampu untuk melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

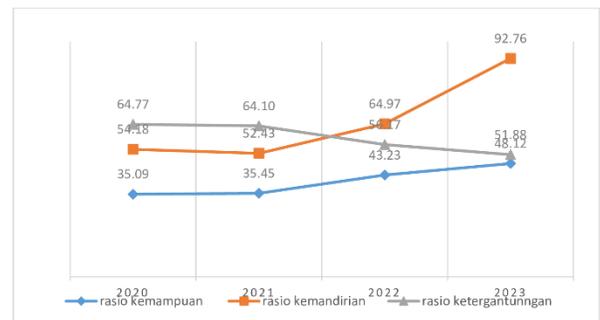
c. Analisis Rasio Ketergantungan Daerah Terhadap Pusat

Analisis rasio ketergantungan daerah terhadap pusat ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemda terhadap pusat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan transfer dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Semakin besar tingkat rasio yang didapatkan, maka akan semakin besar pula ketergantungan pemda terhadap pusat. Oleh karena itu, strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat yaitu dengan meningkatkan nilai pendapatan daerah.

Tabel 9. Rasio Ketergantungan Daerah Provinsi NTB Terhadap Pusat, Tahun 2020 – 2023

Tahun	Rasio Ketergantungan Daerah Terhadap Pusat (%)	Kriteria
2020	64,77	Sangat tinggi
2021	64,10	Sangat tinggi
2022	56,17	Sangat tinggi
2023	51,88	Sangat tinggi

Sumber : data sekunder, diolah peneliti



Grafik 2. Perbandingan nilai rasio kemampuan keuangan daerah, nilai rasio ketergantungan daerah terhadap pusat, dan nilai rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi NTB, tahun 2020 – 2023

Berdasarkan grafik 2 terlihat bahwa kemampuan keuangan daerah dan kemandirian

keuangan daerah pada tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan, hal ini berarti pemerintah daerah sudah mampu melaksanakan wewenangnya untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan pada rasio kemandirian pada tahun 2023, nilai rasio mencapai 92,76% dengan pola hubungan terhadap pemerintah pusat adalah delegatif, artinya Pemda sudah mandiri dalam pelaksanaan otonomi daerahnya. Sedangkan pada rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan mengalami penurunan untuk setiap tahunnya, hal ini berarti ketergantungan pemda NTB kepada pusat mengalami penurunan.

2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja

Analisis rasio pertumbuhan pendapatan digunakan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran pendapatan bernilai positif atau negatif. Apabila rasio pertumbuhan pendapatan bernilai positif, artinya pendapatan pada tahun yang dianalisis mengalami peningkatan, sedangkan apabila rasio pertumbuhan pendapatan bernilai negatif maka kinerja pendapatan mengalami penurunan pada tahun yang dianalisis.

Tabel 10. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Provinsi NTB, Tahun 2020 – 2023

Tahun	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah (%)
2020	0,45	- 0,45
2021	3,81	2,87
2022	17,61	- 0,46
2023	17,85	8,54

Sumber : data sekunder, diolah peneliti

Analisis rasio pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik, dikarenakan beberapa alasan diantaranya penyesuaian terhadap

inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan cakupan layanan.

Tabel 11. Rasio Pertumbuhan Belanja Provinsi NTB, Tahun 2020 – 2023

Tahun	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi (%)	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%)
2020	- 1,71	- 10,10
2021	10,86	21,13
2022	- 10,33	41,29
2023	12,02	- 140,66

Sumber : data sekunder, diolah peneliti



Grafik 3. Perbandingan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Rasio Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan grafik 3 terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan pada tahun 2020 dan 2022 bernilai negatif. Hal ini berarti, bahwa pada tahun tersebut pendapatan pada periode sebelumnya lebih besar dibandingkan pada periode perhitungan, hal ini disebabkan karena pendapatan pada tahun tersebut mengalami penurunan, pada tahun 2020 pendapatan daerah menurun karena imbas dari adanya pandemi covid-19, sedangkan pada tahun 2020 pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Penyesuaian yang mengalami penurunan, sementara dari sisi PAD mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2023 bernilai positif artinya

total pendapatan pada tahun tersebut mengalami peningkatan. Rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2020 dan 2023 bernilai negatif, artinya belanja yang dilakukan pada periode perhitungan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, belanja yang banyak mengalami penurunan berdasarkan data pada LRA adalah pada belanja modal.

3. Rasio Efektivitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja

Rasio efektivitas pendapatan digunakan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan pada suatu periode tertentu.

Tabel 12. Rasio Efektivitas Pendapatan Provinsi NTB, Tahun 2020 – 2023

Tahun	Rasio Efektivitas Pendapatan (%)	Kriteria
2020	95,73	cukup efektif
2021	92,80	cukup efektif
2022	93,51	cukup efektif
2023	93,33	cukup efektif

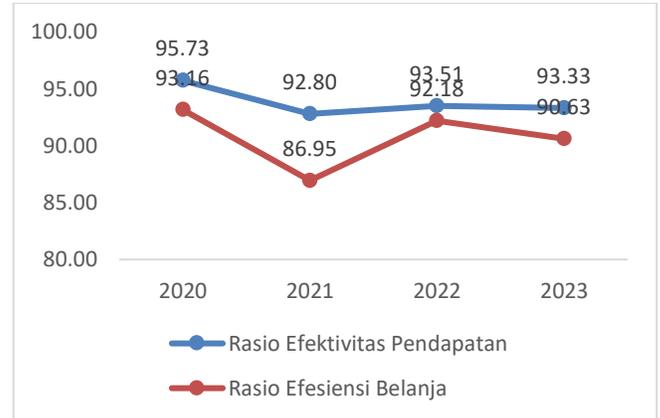
Sumber : data sekunder, diolah peneliti

Rasio efisiensi Belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Jika tingkat efisiensi rendah, berarti belanja negara semakin kecil, sehingga kinerja pemerintah bisa dikatakan semakin baik.

Tabel 13. Rasio Efisiensi Belanja Provinsi NTB, Tahun 2020 – 2023

Tahun	Rasio Efisiensi Belanja (%)	Kriteria
2020	93,16	tidak efisien
2021	86,95	tidak efisien
2022	92,18	tidak efisien
2023	90,63	tidak efisien

Sumber : data sekunder, diolah peneliti



Grafik 4. Rasio Efektivitas pendapatan dan efisien Belanja Pemerintah Provinsi NTB, Tahun 2020 – 2023

Berdasarkan grafik 4 terlihat bahwa rasio efektivitas pendapatan rata-rata sebesar 95,84% berada pada kriteria cukup efektif, artinya pemda sudah cukup mampu merealisasikan pendapatan daerah sesuai dengan target yang sudah dianggarkan. Sedangkan pada efisiensi belanja terlihat bahwa dari tahun 2020 - 2023 dikategorikan tidak efisien karena nilainya di atas 40%. Hal ini dikarenakan untuk belanja akan selalu mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya peningkatan jumlah penduduk yang tentu saja akan berdampak kepada pembangunan dan pelayanan yang akan disediakan pemerintah akan bertambah, inflasi dan juga nilai kurs yang mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan penelitian Asahdi,dkk menyatakan bahwa jumlah penduduk dan kurs berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah dan nilai inflasi berpengaruh negatif terhadap pengeluaran (Asahdi et al., 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dilihat dari rasio kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah pemda NTB mengalami peningkatan yang berarti pemda NTB sudah mampu melaksanakan wewenangnyanya dalam pelaksanaan desentralisasi. Bahkan pada tahun 2023, rasio kemandirian pemda NTB berada pada angka 92,76% dengan pola hubungan delegatif yang artinya daerah mampu dan mandiri untuk

melaksanakan otonominya. Sementara itu untuk rasio ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat terlihat bahwa pemda NTB masih dalam kategori sangat tinggi, yang berarti ketergantungan pemda terhadap dana eksternal berupa transfer dari pemerintah masih sangat besar. Untuk rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2020 bernilai dan 2022 bernilai negatif. Hal ini berarti, bahwa pada tahun tersebut tidak terjadi peningkatan pendapatan daerah, ini karena pada tahun 2020 pendapatan daerah menurun karena imbas dari adanya pandemi covid-19, sedangkan pada tahun 2020 pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Penyesuaian yang mengalami penurunan, sementara dari sisi PAD mengalami peningkatan. Untuk rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2021 dan 2023 bernilai positif, artinya pendapatan daerah pada tahun tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan pada rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2020 dan 2023 bernilai negatif, artinya belanja yang dilakukan pada periode perhitungan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, belanja yang banyak mengalami penurunan berdasarkan data pada LRA adalah pada belanja modal. Untuk rasio efektivitas pendapatan berada pada kategori cukup baik dan efisiensi belanja pada tahun 2020 – 2023 bernilai > 40% artinya tidak efisien. Hal ini disebabkan karena, belanja pemerintah setiap tahunnya akan mengalami peningkatan karena pembangunan dan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat akan selalu bertambah dan ditingkatkan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga karena nilai kurs. Pemerintah daerah NTB diharapkan memaksimalkan kembali peningkatan pendapatan daerah, terutama melalui PAD, sumber-sumber PAD yang sudah memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan daerah agar lebih dimaksimalkan kembali dan yang belum memberikan kontribusi yang cukup, agar menjadi perhatian dan dianalisis kembali strategi yang sudah digunakan untuk peningkatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

Ambya. (2023). *Ekonomi Keuangan Daerah*. AURA Publishing.
Anjani, Eka Sintala Dewi, Akram, Handajani, L. (2015). Hubungan PAD, Belanja Modal

- dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura*, 1. <https://doi.org/10.16285/j.rsm.2007.10.006>
- Asahdi, Hamzah, A., & Musnadi, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 9(2), 65. <https://jurnal.usk.ac.id/MIE/article/view/4742/4091>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024). *Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024*. 14.
- Halim, A. (2007). *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. UPP AMP YKPN.
- Irnowati. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kota Makasar*. 4, 403–416. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/113738
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023). Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. *Jakarta: Pemerintah Pusat*, 167292, 1–3.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Nurabiah, N. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(1), 067–100. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i1.36>
- Patarai, D. M. I. (2018). *Kinerja Keuangan Daerah.pdf* (pp. 1–324).
- Pemerintah Provinsi NTB. (2022). *Laporan Realisasi Anggaran NTB Tahun Anggaran 2020-2021*.
- Pemerintah Provinsi NTB. (2023). *Laporan APBD Provinsi NTB Tahun 2022*.
- Pemerintah Provinsi NTB. (2024). *Laporan Realisasi Anggaran NTB Tahun Anggaran 2023*.
- Putra, H. C., Hukum, P. I., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2022). Konsep Pengelolaan Keuangan Negara Dan Barang-Barang Publik. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 2(2), 1–17. <https://doi.org/10.30596/japk.v2i2.11016>

Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 75–94.

<https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.325>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 125 (2004).

Sekretaris Negara Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.